

KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH & HUBUNGANNYA DENGAN BELANJA PEMERINTAH: STUDI DI INDONESIA

Inequality between Regions & Their Relationship with Government Expenditures: A Study in Indonesia

Marihot Nasution

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: marihot.nasution@dpr.go.id

Abstract

This study examines the development of inequality between regions in Indonesia from 2010-2019. Tests are carried out by grouping using Klassen's typology and measuring the value of inequality using the Williamson Index. In addition, the results of the inequality calculation are tested for correlation with government spending according to type, namely personnel expenditure, material expenditure, capital expenditure, subsidy expenditure, grant expenditure, social assistance expenditure and transfers to the regions.

The results showed that the Klassen typology categorized 2 provinces as developed and rapidly developing provinces/quadrant 1, namely DKI Jakarta and Riau Islands. Meanwhile, 8 provinces are included in the group of provinces that are categorized as underdeveloped (quadrant 3). For the group of provinces that are classified as developing with per capita income exceeding the average but with low growth and are in quadrant 4, there are 5 provinces and other provinces (19 provinces) are included in quadrant 2 where the growth is high but the GDP per capita is below the average. Meanwhile, the value of inequality as measured by the Williamson index during 2010-2019 is in the range of 0.70-0.76, which is close to number 1, meaning that Indonesia experiences high regional inequality.

The results of the correlation testing for variations in the Williamson Index on variations in state expenditure show that personnel spending, goods spending, capital expenditures and transfers to regions have a positive and significant relationship to the Williamson index. This proves that state spending is still not evenly distributed and still unable to lift regions with low growth.

Keywords: *inequality between regions, Williamson index, government spending*

1. Pendahuluan

Kesenjangan antarwilayah di Indonesia masih merupakan salah satu tantangan penting dalam pembangunan nasional. Saat ini, kesenjangan antar wilayah di Indonesia dipandang relatif masih cukup tinggi, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2019 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 59,00 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32 persen, dan Pulau Kalimantan 8,05 persen (BPS, 2020). Bahkan, selama 30 tahun (1986-2019) kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KBI sangat dominan dan tidak pernah kurang dari 80 persen terhadap PDB (BPS, 2020). Oleh karena itu, upaya untuk melakukan percepatan pemerataan pembangunan, termasuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah menjadi salah satu agenda pembangunan nasional.

Kesenjangan antarwilayah juga dapat dilihat dari masih terdapatnya kabupaten yang merupakan daerah tertinggal tersebar di wilayah Indonesia. Di tahun 2020 masih terdapat 62 daerah tertinggal yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Isu kesenjangan wilayah ini juga terkait dengan isu pemerataan pembangunan. Isu pemerataan pembangunan menjadi suatu keniscayaan bila kita cermati komparasinya dengan perkembangan kawasan regional, melalui peringkat indeks pembangunan inklusif atau Inclusive Development Index (IDI), yang dirilis World Economic Forum (WEF) tahun 2018. Secara umum, WEF melihat negara-negara berkembang menunjukkan peningkatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Dari 77 negara berkembang, Indonesia menempati peringkat ke-36 indeks pemerataan pembangunan (peringkat ke-22 di tahun 2017), di bawah Malaysia (peringkat ke-13 tahun 2018 dan ke-16 tahun 2017), Thailand (peringkat ke-17 tahun 2018 dan ke-12 tahun 2017) dan Vietnam (peringkat ke-33 di tahun 2018).

Upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan tersebut salah satunya dengan menerapkan kebijakan fiskal yang sehat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi; pola persebaran sumber daya; dan distribusi pendapatan. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat memengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat memengaruhi kesempatan kerja, dapat memengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional, dan dapat memengaruhi distribusi penghasilan nasional.

Namun, hingga kini belanja negara melalui konsumsi pemerintah dan investasi dinilai belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kajian Bappenas (2019), yang menguji andil belanja negara tahun

2016-2017 terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode 2017-2018 menyatakan bahwa meskipun pengeluaran pemerintah (khususnya belanja kementerian/lembaga) naik namun kenaikan tersebut hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,24 persen, jauh dari angka yang direncanakan sebelumnya yaitu 0,66 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal khususnya belanja pemerintah belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyebabnya, pengalokasian anggaran sendiri yang belum tepat sasaran sehingga belanja tersebut belum memiliki efek ekonomi secara makro. Lebih khususnya, belanja tersebut belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan maupun kesenjangan antar daerah, mengurangi jumlah pengangguran, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah melalui kementerian/lembaga juga masih cenderung terjebak pada dana rutin yang tidak memberikan dampak ekonomi besar. Misalnya, peningkatan belanja pegawai atau belanja barang yang relatif tidak perlu. Sementara itu, alokasi belanja modal masih belum mendominasi di kementerian/lembaga dan sering penyerapannya menumpuk di akhir tahun.

Penyebab lain mengapa belanja pemerintah masih dinilai belum berandil optimal dalam pertumbuhan ekonomi dan nantinya pengurangan ketimpangan antar wilayah di antaranya disebabkan karena sempitnya ruang gerak fiskal APBN. Saat ini terdapat beberapa belanja rutin yang tidak dapat ditinggalkan atau bersifat mengikat (*mandatory spending*), di antaranya belanja pegawai, transfer ke daerah, pembayaran utang hingga kewajiban mengalokasikan 20 persen untuk pendidikan dan 5 persen untuk kesehatan.

Untuk itu, perlu dikaji bagaimana kondisi ketimpangan antar wilayah di Indonesia selama ini dan hubungannya dengan belanja pemerintah yang telah direalisasikan. Studi ini diharapkan dapat menjadi langkah evaluasi bagi pemerintah dalam mengalokasikan sumber dayanya melalui kebijakan fiskal yang berorientasi pemerataan pembangunan antar wilayah secara optimal. Pengkajian ini tepat dilaksanakan saat ini mengingat Indonesia sedang fokus mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia yang merupakan jawaban terhadap masalah ketimpangan. Salah satu strateginya dapat dilakukan dengan menjamin ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan antarwilayah, sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi lokal.

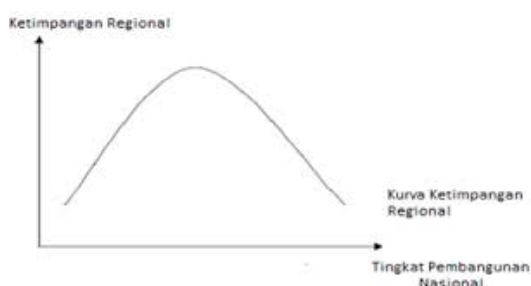
2. Tinjauan Pustaka

Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah merupakan fenomena umum dalam proses pembangunan ekonomi. Hal ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini berimplikasi terhadap kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah akibat kecemburuan masyarakat terutama yang berasal dari daerah dengan

tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Berdasarkan definisi OECD (2003), kesenjangan wilayah (*regional disparities*) menggambarkan perbedaan intensitas yang dimanifestasikan melalui fenomena ekonomi yang diamati pada sejumlah wilayah dalam satu negara. ILO (2002) dalam Kutscherauer, et al. 2010 menyebutkan bahwa kesenjangan wilayah adalah perbedaan performa ekonomi dan kesejahteraan antarwilayah.

Secara teoritis, ketimpangan pembangunan antar-wilayah dimunculkan dari Teori Pertumbuhan Neo-Klasik dari Douglas C. North (Sjafrizal, 2014) dimana muncul prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Menurut teori tersebut pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi hingga ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah memiliki bentuk huruf U terbalik (*reversed U-shape curve*) seperti tampak di gambar di berikut (Sjafrizal, 2014).

Gambar 1. Kurva Ketimpangan Pembangunan



Williamson (1966) dalam Sjafrizal (2014) menguji kebenaran Teori Pertumbuhan Neo-Klasik ini dengan mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah menggunakan Indeks Williamson. Penghitungan indeks Williamson ini dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Dimana:

Y_i = PDRB per kapita provinsi i

Y = PDRB per kapita rata-rata nasional

f_i = jumlah penduduk di provinsi i

n = jumlah penduduk nasional

Dengan indikator angka indeks Williamson yang diperoleh terletak antara 0 sampai dengan 1, jika mendekati 0 berarti ketimpangan (disparitas) antar

wilayah semakin rendah atau dengan kata lain pembangunan antar wilayah terjadi secara merata, tetapi jika bila angka indeks menunjukkan semakin jauh dari nol atau mendekati 1 maka ketimpangan pembangunan antar wilayah semakin tinggi serta mengidentifikasi adanya pertumbuhan ekonomi regional yang tidak merata. Indeks Williamson ini memiliki kelemahan yaitu merupakan yang sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, seperti terjadi dalam penelitian Sjafrizal (2002) yang membahas ketimpangan antarwilayah di Indonesia pada periode 1993-2000 dengan memisahkan ibukota Indonesia, DKI Jakarta dalam pengukuran indeks. Hasil pengukuran indeks ketimpangan wilayah menunjukkan pengaruh kehadiran DKI Jakarta dalam penghitungan ternyata relatif signifikan dikarenakan struktur ekonomi daerah yang berbeda dibandingkan daerah lain yang diikutkan dalam pengukuran. Meskipun demikian indeks ini sudah lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Melihat ketimpangan wilayah juga dapat dilakukan dengan analisis tipologi Klassen. Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah (Syafrizal, 1997). Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi pada sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita pada sumbu horizontal. Klassen mengklasifikasikan tingkat pembangunan menjadi empat kuadran utama yaitu sektor maju dan tumbuh pesat, sektor pertumbuhan tertekan, sektor potensial atau masih bisa tumbuh dan sektor relatif tertinggal (Gambar 2).

Gambar 2. Tipologi Klassen



Dimana:

r_i : PDRB per kapita provinsi i

r : PDRB per kapita wilayah

v_i : pertumbuhan ekonomi provinsi i

v : pertumbuhan ekonomi wilayah

Potensi ketimpangan pendapatan antar daerah akan selalu ada karena kondisi daerah yang berbeda, termasuk faktor *endowment* yang berbeda antardaerah. Semakin besar perbedaan pendapatan perkapita antar daerah berarti ketimpangan pendapatan antar daerah semakin melebar (*divergen*). Banyak faktor yang menentukan ketimpangan pendapatan antardaerah, yaitu konsentrasi kegiatan ekonomi antardaerah, mobilitas barang (perdagangan), faktor produksi antardaerah, alokasi investasi publik dan swasta lintas daerah. Konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah akan menyebabkan ketimpangan antar daerah semakin besar (Sjafrizal, 2008). Konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah menunjukkan perbedaan pertumbuhan antar daerah juga. Alokasi investasi pemerintah disini adalah pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, perbedaan pengeluaran pemerintah di suatu daerah dengan daerah lainnya akan menyebabkan ketimpangan pendapatan antar daerah tersebut.

Mukaramah, dkk. (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran publik terhadap ketimpangan pendapatan antara pedesaan dan perkotaan di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran publik pemerintah untuk pendidikan dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan antar etnis dan ketimpangan pendapatan antara perkotaan dan pedesaan. Pengeluaran pemerintah untuk pertanian dan pembangunan pedesaan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan antar kelompok etnis dan berpengaruh terhadap disparitas pendapatan antara perkotaan dan pedesaan.

Calderon dan Servien (2004) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Panel data digunakan dari 121 negara selama tahun 1960-2000. Penelitian ini menggunakan persamaan regresi. Hasil studi menunjukkan bahwa dari segi kuantitas, infrastruktur memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Secara kualitas, infrastruktur berpengaruh lemah terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah infrastruktur harus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan ketimpangan pendapatan. Artinya, pembangunan infrastruktur melalui belanja pemerintah dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

Martines-Vazquez, dkk. (2012) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pajak dan pengeluaran publik terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian ini menggunakan data panel 150 negara maju, negara berkembang dan negara transisi, selama 1970-2009, dengan alat analisis OLS dan GMM (*Generalized Method of Moment*). Variabel terikat adalah koefisien gini. Variabel independen adalah pajak dan pengeluaran publik. Pengeluaran publik adalah perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan dan perumahan. Analisis menemukan bahwa pajak dan pengeluaran publik secara signifikan memengaruhi koefisien gini (ketimpangan pendapatan). Pajak progresif (atas penghasilan) secara positif memengaruhi distribusi pendapatan dan berkontribusi pada penurunan ketimpangan pendapatan. Pajak penghasilan badan berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan, namun pengaruhnya menurun seiring dengan meningkatnya globalisasi dan keterbukaan

perdagangan (perdagangan internasional). Pangsa pengeluaran publik dalam PDB untuk kesejahteraan sosial, pendidikan dan perumahan berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan. Dari sisi belanja publik, meningkatnya belanja perlindungan sosial menyebabkan koefisien gini 0,22 menurun. Meningkatnya pengeluaran untuk kesehatan masyarakat menyebabkan penurunan ketimpangan pendapatan. Penurunan pengeluaran publik untuk pendidikan dan perumahan menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan.

Alokasi dana publik antar daerah melalui anggaran negara merupakan instrumen kebijakan utama untuk mengatasi disparitas daerah (Acconcia & Del Monte, 1999). Di negara maju, efek utama dari kebijakan redistributif dan transfer adalah bahwa daerah berpenghasilan rendah menikmati aliran masuk sumber daya yang positif, yaitu, mereka membayar pajak lebih sedikit daripada yang mereka terima sebagai layanan dan manfaat, sementara daerah berpenghasilan tinggi memberikan dukungan keuangan. Perpindahan dana antar wilayah muncul setidaknya karena dua alasan. Pertama, setiap daerah merupakan bagian dari masyarakat dengan standar nasional untuk pelayanan publik dan kesejahteraan, dan basis perpajakan yang sama. Hal ini memastikan bahwa, untuk daerah dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah dari rata-rata nasional, jumlah yang dibayarkan untuk pajak lebih rendah dari jumlah belanja publik yang diterima. Kedua, daerah miskin mendapatkan manfaat dari kebijakan daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong pertumbuhan. Bentuk utama dari kebijakan ini adalah investasi di bidang infrastruktur dan subsidi untuk mendorong investasi masuk.

McCulloch dan McKay dalam Raychaudhuri (2010), menjelaskan bagaimana peran pembangunan infrastruktur dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan kemudian menekan ketimpangan. Hubungan pembangunan infrastruktur sendiri dalam mengurangi tingkat kemiskinan bersifat tidak langsung. Adanya investasi pada bidang infrastruktur, baik dari sisi pemerintah maupun swasta, akan memengaruhi produktivitas dan jumlah angkatan kerja dalam berbagai sektor. Dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menambah produktivitas suatu sektor sehingga dapat menyerap tenaga kerja, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan upah/gaji pada kaum miskin. Kedua hal tersebut memengaruhi penawaran dan harga dari barang-barang kebutuhan pokok, selanjutnya dengan perkembangan dari kualitas hidup tersebut maka dapat terciptanya pengurangan angka kemiskinan. Semakin berkurangnya tingkat kemiskinan, maka akan memicu terjadinya peningkatan kesejahteraan dari masyarakat, sehingga yang diharapkan, akan mendorong terjadinya pengurangan dari tingkat ketimpangan (Raychaudhuri, 2010). Maka dari itu, dengan infrastruktur yang memadai maka akan memudahkan sekaligus mengundang investor masuk ke suatu daerah sehingga akan meningkatkan kondisi ekonomi pada daerah tersebut yang kemudian mengangkat perekonomian suatu daerah dan menjadikan daerah tersebut setara dengan daerah lainnya. Nangarumba (2015) juga membuktikan bahwa anggaran pada bidang infrastruktur dapat berkontribusi mengurangi besaran tingkat ketimpangan pendapatan.

Semua studi ini menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan dapat bervariasi antar negara. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan bisa positif atau negatif, tergantung jenis pengeluaran pemerintah. Meskipun kesenjangan antarwilayah hampir tidak mungkin dihilangkan sama sekali, namun upaya untuk mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah perlu dilakukan. Hal ini untuk menghindari berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat tingginya kesenjangan antar wilayah. Tingginya kesenjangan antarwilayah dapat mengancam kestabilan kondisi sosial-ekonomi di antaranya potensi munculnya dampak negatif terutama terhadap kohesi sosial politik (Bappenas, 2018). Meskipun pertumbuhan ekonomi berlangsung cukup tinggi, namun akan muncul persepsi publik bahwa kesejahteraan belum dapat dinikmati oleh semua orang, sehingga keadilan dan pemerataan belum terjadi. Kesenjangan yang meningkat akan mengurangi pertumbuhan ekonomi melalui beberapa hal, di antaranya: perubahan pola permintaan, perubahan ukuran pasar domestik, berkurangnya kegiatan kewirausahaan, keterkaitan ekonomi politik dan instabilitas bagi perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya; serta ketidakmampuan kelompok miskin kronis keluar dari kemiskinan akan memperlebar kesenjangan dan melemahkan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini masih cukup besar jumlah masyarakat miskin dan rentan yang tidak terlindungi atau tidak mendapatkan manfaat bantuan dan jaminan sosial.

Oleh karena itu, upaya untuk melakukan percepatan pemerataan pembangunan, termasuk mengurangi ketimpangan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan antarkelompok sosial-ekonomi dan antar wilayah menjadi salah satu agenda pembangunan nasional. Hal ini diwujudkan oleh agenda prioritas (Nawacita) Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di masa kepemimpinannya periode 2015-2019, khususnya dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Komitmen nasional ini selanjutnya tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 dalam dimensi pembangunan “Pemerataan dan Kewilayahan”. Upaya ini pun dilanjutkan di masa kepemimpinan Presiden Jokowi di 2020-2024. Komitmen nasional tersebut kemudian diterjemahkan dalam rencana kerja pemerintah tahunan, dialokasikan anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui tiga fungsi utamanya, yaitu: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Selain itu, APBN berperan strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menstimulasi investasi, dan memastikan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia didistribusikan merata dan berkeadilan. Dalam rangka mendukung pembangunan kewilayahan sebagaimana dirumuskan pada RPJMN Tahun 2020-2024, pemerintah mengalokasikan APBN ke wilayah melalui belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang meningkat sejak implementasi otonomi daerah. Belanja K/L dikelompokkan menurut jenis pengeluaran di antaranya melalui: a) belanja

pegawai, b) belanja barang, c) belanja modal, d) belanja subsidi, e) belanja hibah, f) belanja bantuan sosial, dan g) belanja lain-lain.

Kebijakan alokasi anggaran melalui belanja K/L dan TKDD tersebut secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program prioritas pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, program di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya penyaluran TKDD juga terus diarahkan menjadi berbasis kinerja seperti DAK Fisik dan Dana Desa yang bersifat investasi dan berkontribusi secara langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat sampai dengan level paling rendah yakni desa, sehingga hal tersebut diharapkan mampu menstimulasi peningkatan kemandirian fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita masyarakat. TKDD merupakan bagian belanja negara yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa. Sementara itu, meskipun belanja K/L masuk sebagai kategori Belanja Pemerintah Pusat, namun pelaksanaan dan manfaatnya dirasakan sampai ke daerah, baik yang dilaksanakan satker pusat maupun satker daerah. Alokasi belanja K/L terkait hal tersebut dapat dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, pelaksanaan kegiatannya dilakukan di daerah dalam rangka mendanai program-program pemerintah di daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan (Kartu Indonesia Pintar dan Bidikmisi), kesehatan (bantuan untuk iuran dalam rangka jaminan kesehatan nasional), serta program perlindungan sosial (PKH dan bantuan pangan). Kedua, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang merupakan pelimpahan wewenang atau penugasan dari pemerintah kepada gubernur/daerah yang berasal dari APBN dan dilaksanakan oleh gubernur/daerah. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah bantuan benih, alat pertanian, dan kegiatan penyuluhan oleh Kementan; bantuan makanan tambahan dan penyuluhan kesehatan oleh Kemenkes; kegiatan restorasi gambut oleh Kemen LHK; pemeliharaan jalan/jembatan/jaringan irigasi oleh Kemen PUPR; pendamping dana desa pada Kemendes dan PDTT; dan pembangunan pasar rakyat oleh Kemendag. Ketiga, belanja K/L yang alokasi anggarannya tercatat di pusat namun kegiatannya ada di daerah, antara lain: kegiatan pelatihan/ sosialisasi, serta kegiatan pengadaan dan pemeliharaan/perawatan alutsista.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengetahui ketimpangan antar wilayah di Indonesia dengan menggunakan tipologi Klassen dan indeks Williamson. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa komponen penghitungan pengujian ketimpangan antar wilayah dengan menggunakan tipologi Klassen dan indeks Williamson menggunakan variabel di antaranya: PDRB per kapita, pertumbuhan PDRB provinsi dan jumlah penduduk tiap provinsi. Data dari variabel tersebut diperoleh dari data dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 hingga 2019. Penggunaan kedua analisis ketimpangan tersebut untuk memberikan gambaran komprehensif

ketimpangan wilayah di Indonesia. Analisis tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Mengingat Indeks Williamson bersifat sensitif terhadap daerah yang diikuti dalam pengujian maka perlu dilakukan pengujian yang mengeluarkan sampel *outlier*, dalam hal ini Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengukur pemerataan pembangunan secara riil. Penghitungan indeks Williamson dilakukan secara nasional dan per provinsi untuk melihat ketimpangan di dalam wilayah Indonesia dan ketimpangan dalam provinsi.

Dalam menguji hubungan antara ketimpangan antar wilayah secara nasional dengan belanja pemerintah digunakan data belanja pemerintah berdasarkan jenisnya yaitu belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja transfer ke daerah dan belanja pemerintah pusat secara total. Selain itu, data belanja pemerintah diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 hingga 2019. Sementara itu, data PDB diperoleh dari BPS.

Mengingat jumlah sampel yang digunakan untuk menguji hubungan berjumlah kurang dari 30 data (periode 2010-2019) maka pengujian hubungan menggunakan uji korelasi Rank Spearman yang merupakan uji korelasi nonparametrik. Korelasi Rank Spearman dipergunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal dan sampelnya kecil (<30).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Deskriptif Statistik

Dari pengumpulan data diperoleh 542 pemerintah daerah yang memiliki data lengkap yang diperoleh dari NPD. Data tersebut merupakan jumlah seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Dari hasil pengolahan data PDRB provinsi di Indonesia diperoleh indeks Williamson diketahui bahwa nilai indeks Williamson selama 2010-2019 berada di kisaran 0,70-0,76 yang artinya ketimpangan wilayah di Indonesia masih cukup tinggi mendekati angka 1 dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata indeks Williamson pada periode tersebut adalah 0,738. Meskipun demikian, data BPS menunjukkan bahwa rasio gini Indonesia yang menunjukkan ketimpangan pendapatan Indonesia berada di angka rata-rata 0,395 dan makin menurun dari tahun ke tahun. Sehingga meskipun pendapatan makin tersebar merata namun ketimpangan pembangunan wilayah masih belum menunjukkan hasil yang sama.

Sementara itu, data belanja pemerintah dapat dilihat sebarannya pada Tabel 1. Belanja pemerintah di tiap jenisnya meningkat tiap tahunnya. Selama periode 10 tahun ini masing-masing belanja pemerintah di kementerian/lembaga memiliki nilai rata-rata Rp237,46, Rp172,31 triliun, Rp135,35 triliun untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal secara berurutan. Sementara itu, untuk belanja pemerintah lainnya berupa belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain memiliki rata-rata

Rp245,01 triliun, Rp2,29 triliun, Rp77,98 triliun dan Rp14,02 triliun secara berurutan. Untuk belanja transfer ke daerah sebagai wujud desentralisasi rata-rata realisasi alokasi belanjanya adalah Rp547,57 triliun.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

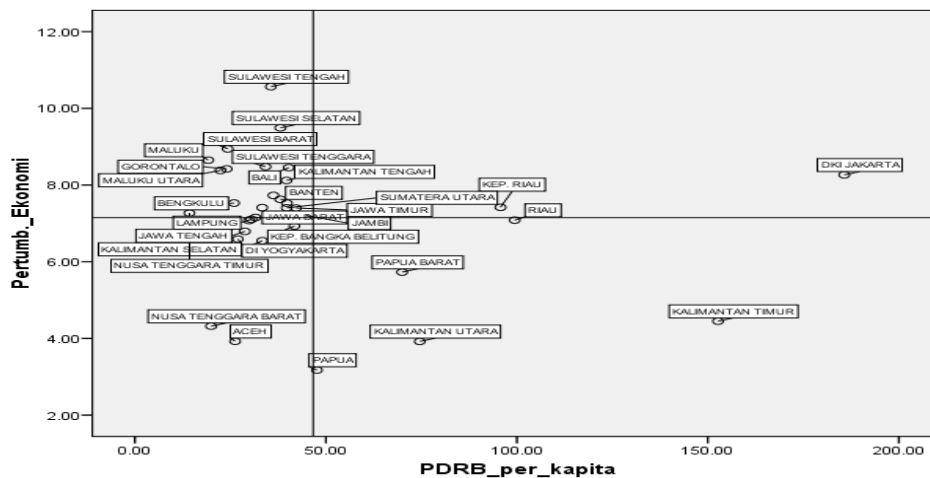
	Belanja Pegawai (triliun Rp)	Belanja Barang (triliun Rp)	Belanja Modal (triliun Rp)	Belanja Subsidi (triliun Rp)	Belanja Hibah (triliun Rp)	Belanja Bansos (triliun Rp)	Belanja Lain-lain (triliun Rp)	Transfer ke Daerah (triliun Rp)	Total Bel. Pem. Pusat (triliun Rp)
Mean	237.46	172.31	135.35	245.01	2.29	77.98	14.02	547.57	1,067.41
Standard Error	25.31	28.05	15.15	24.45	0.79	5.56	3.20	53.15	83.67
Median	232.70	155.30	146.23	209.34	1.11	74.72	10.85	543.48	1,145.59
Standard Deviation	87.69	104.97	56.67	84.71	2.74	19.27	11.09	184.11	289.84
Range	263.24	300.42	160.48	253.88	7.13	62.87	35.56	520.54	867.50
Minimum	112.83	47.05	54.95	138.08	-	49.61	3.37	292.43	628.81
Maximum	376.07	347.47	215.43	391.96	7.13	112.48	38.93	812.97	1,496.31
Count	12.00	14.00	14.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00

Sumber: Hasil olah data

4.2. Hasil Pengujian Empiris

Hasil analisis pengelompokan provinsi menggunakan tipologi Klasen membagi 34 provinsi di Indonesia ke dalam 4 kuadran berdasarkan data PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi provinsi rata-rata selama 2010-2019 tampak di Gambar 4 di bawah ini. Dapat diketahui bahwa provinsi yang berada dalam kelompok provinsi yang maju dan berkembang pesat berada di kuadran 1 hanyalah DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Sementara itu, kelompok provinsi yang masuk dalam kategori tertinggal (kuadran 3) di antaranya Aceh, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Untuk kelompok provinsi yang tergolong berkembang dengan pendapatan per kapita melebihi rata-rata namun pertumbuhannya rendah dan berada di kuadran 4 di antaranya Provinsi Riau, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Papua. Provinsi lainnya (19 provinsi) masuk ke dalam kuadran 2 dimana pertumbuhannya tinggi namun PDRB per kapitanya di bawah rata-rata.

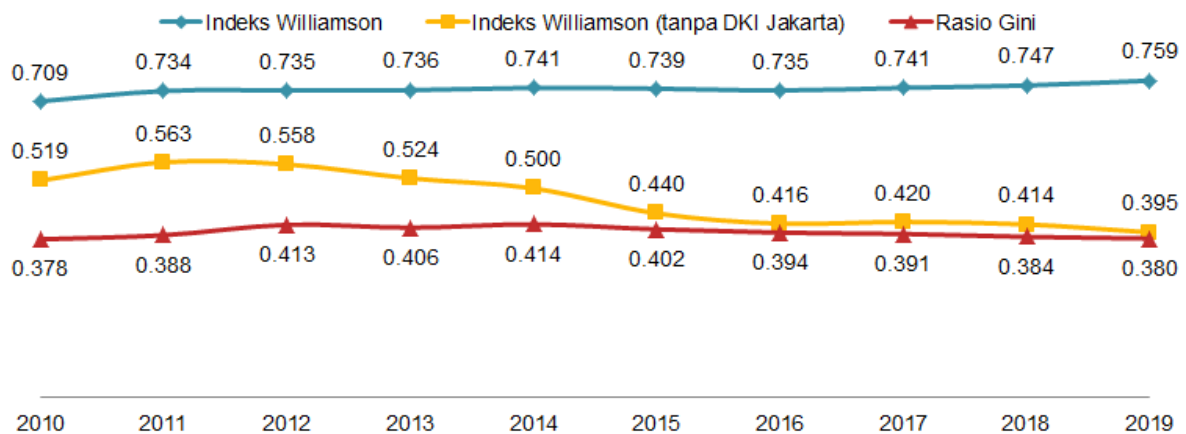
Gambar 4. Tipologi Klasen Provinsi se-Indonesia



Sumber: Hasil olah data

Hasil tipologi Klassen provinsi di atas berhubungan positif dengan ketersediaan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia di wilayah tertentu, sehingga semakin tinggi nilai dari faktor tersebut maka makin tinggi pula kesenjangannya. Sementara itu, faktor sumber daya alam dan alokasi belanja pembangunan pemerintah juga memberi andil bagi kesenjangan tersebut. Makin tinggi nilai sumber daya alam dan alokasi belanja pemerintah di suatu wilayah maka kesenjangan pembangunan justru makin berkurang. Alokasi belanja pemerintah dapat dilihat dari program pemerintah yang merupakan interpretasi arah kebijakan umum pembangunan nasional dari pemerintah.

Gambar 5. Indeks Williamson dan Rasio Gini Indonesia, 2010-2019



Sumber: Hasil olah data

Seperti disampaikan sebelumnya bahwa nilai ketimpangan yang diukur dengan indeks Williamson berada di kisaran 0,70-0,76 yang mendekati angka 1, artinya Indonesia mengalami ketimpangan wilayah yang tinggi. Namun jika wilayah yang merupakan *outlier*, atau dalam hal ini DKI Jakarta yang memiliki perkembangan jauh di atas wilayah yang lain dikeluarkan dari penghitungan maka nilai indeks Williamson akan menunjukkan hasil yang lebih rendah (Gambar 5). Hasil ini menunjukkan bahwa tanpa DKI Jakarta, pembangunan wilayah Indonesia relatif lebih merata dengan angka indeks Williamson 0,395 di tahun 2019 turun dari 0,519 di tahun 2010. Penurunan ini merupakan prestasi bagi pemerintahan periode 2010-2019, mengingat sejak 2010 pembangunan kewilayahan menjadi agenda bagi pemerintahan kala itu. Pada awal periode pemerintahan Jokowi di 2009 lalu, pembangunan infrastruktur dan pembangunan dari pinggiran menjadi prioritasnya.

Tabel 2. Indeks Williamson Indonesia Menurut Provinsi, 2010 dan 2018

Provinsi	Indeks Williamson 2010	Provinsi	Indeks Williamson 2018
GORONTALO	0.1759	GORONTALO	0.1259
KEP. BANGKA BELITUNG	0.1856	KALIMANTAN UTARA	0.1464
KALIMANTAN TENGAH	0.2315	KALIMANTAN TENGAH	0.1706
LAMPUNG	0.2328	KEP. BANGKA BELITUNG	0.1997
KALIMANTAN BARAT	0.2350	MALUKU	0.2282
SULAWESI TENGAH	0.2392	SUMATERA BARAT	0.2590
SUMATERA BARAT	0.2644	MALUKU UTARA	0.2734
MALUKU UTARA	0.2720	KALIMANTAN BARAT	0.2777
BALI	0.2723	LAMPUNG	0.2785
SULAWESI BARAT	0.2937	BALI	0.3107
MALUKU	0.3131	ACEH	0.3487
KALIMANTAN UTARA	0.3180	SULAWESI BARAT	0.3539
SULAWESI TENGGARA	0.3423	BENGKULU	0.3789
SULAWESI UTARA	0.3658	KALIMANTAN SELATAN	0.3939
BENGKULU	0.3743	JAMBI	0.4456
SUMATERA UTARA	0.4057	KEP. RIAU	0.4541
ACEH	0.4495	DI YOGYAKARTA	0.4594
DI YOGYAKARTA	0.5130	RIAU	0.4686
KALIMANTAN SELATAN	0.5188	KALIMANTAN TIMUR	0.4865
DKI JAKARTA	0.5456	SULAWESI UTARA	0.5043
SUMATERA SELATAN	0.5464	DKI JAKARTA	0.5102
NUSA TENGGARA TIMUR	0.5544	SULAWESI TENGAH	0.5475
JAMBI	0.5622	SULAWESI TENGGARA	0.5515
SULAWESI SELATAN	0.5675	NUSA TENGGARA BARAT	0.5854
RIAU	0.5725	SUMATERA UTARA	0.6110
KEP. RIAU	0.6543	SULAWESI SELATAN	0.6219
JAWA BARAT	0.6692	JAWA TENGAH	0.6221
KALIMANTAN TIMUR	0.6751	BANTEN	0.6248
JAWA TENGAH	0.7189	NUSA TENGGARA TIMUR	0.6277
BANTEN	0.7741	JAWA BARAT	0.6735
JAWA TIMUR	0.9593	SUMATERA SELATAN	0.7305
PAPUA BARAT	1.5412	JAWA TIMUR	0.9834
NUSA TENGGARA BARAT	1.7026	PAPUA BARAT	1.3300
PAPUA	2.0712	PAPUA	1.8546

Sumber: Hasil olah data

Sementara itu, penghitungan indeks Williamson tiap provinsi untuk mengukur ketimpangan wilayah dalam provinsi di tahun 2010 dan 2018 menunjukkan bahwa masih banyak provinsi yang memiliki tingkat ketimpangan tinggi (indeks Williamson di atas 0,5, Tabel 2). Dari hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa indeks tersebut mengalami penurunan di 18 provinsi, sedangkan 15 provinsi lainnya mengalami peningkatan indeks Williamson (Tabel 2). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun pemerintah daerah telah membuahkan hasil, namun belum merata karena masih ada provinsi yang memiliki indeks Williamson di atas 1 karena struktur ekonomi daerahnya memang menyebabkan ketimpangan. Provinsi tersebut di antaranya Papua dan Papua Barat. Kedua provinsi tersebut memiliki

kabupaten yang memiliki PDRB sangat tinggi dibandingkan PDRB wilayah kabupaten lainnya dalam provinsi tersebut. Hal tersebut menunjukkan struktur ekonomi yang jauh berbeda antar kabupaten/kota dan hadirnya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber PDRB. Untuk kasus Provinsi Papua dan Papua Barat, keduanya memiliki kabupaten yang memiliki PDRB tinggi dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Sesuai dengan rumus penghitungan indeks Williamson yang menggunakan PDRB per kapita maka dengan kondisi jumlah penduduk kabupaten di kedua provinsi tersebut yang relatif sedikit menyebabkan kabupaten dengan PDRB dari pertambangan dan penggalian yang nilainya tinggi memiliki PDRB per kapita yang jauh lebih besar dari kabupaten lainnya dalam provinsi tersebut. Kabupaten tersebut di antaranya Kabupaten Mimika di Provinsi Papua dan Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat.

Hasil pengujian korelasi belanja pemerintah dengan indeks Williamson yang mengukur ketimpangan antar wilayah menggunakan analisis korelasi Spearman Rank menunjukkan bahwa belanja pemerintah selama 2010-2019 berupa belanja pegawai, belanja barang, belanja modal serta transfer ke daerah berhubungan positif dan signifikan terhadap indeks Williamson. Selain itu, secara total jumlah belanja pemerintah pusat memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap indeks Williamson yang dihitung dengan memasukkan DKI Jakarta dalam perhitungan indeks. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (*sig./p value*) yang kurang dari 0,05 (Tabel 3, sisi kanan).

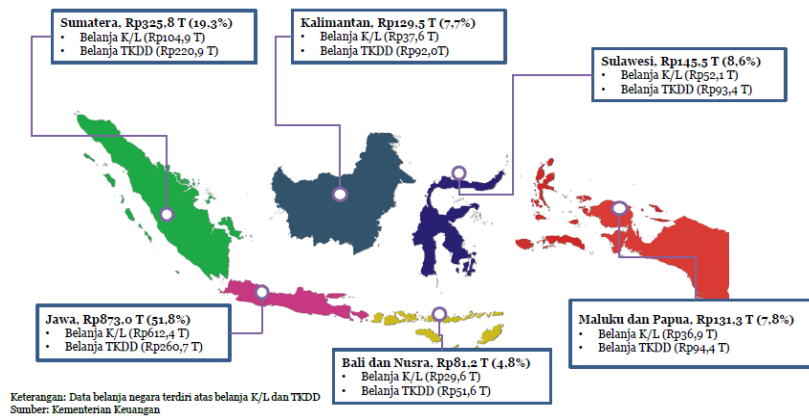
Tabel 3. Hasil Korelasi Indeks Williamson dengan Belanja Pemerintah

Korelasi dengan Indeks Williamson tanpa DKI Jakarta sebagai outlier		Variabel	Korelasi dengan Indeks Williamson	
Nilai Korelasi Spearman Rank	Sig. (<i>p value</i>)		Nilai Korelasi Spearman Rank	Sig. (<i>p value</i>)
-0,915**)	0,000	Belanja pegawai	0,878**)	0,001
-0,903**)	0,000	Belanja barang	0,866**)	0,001
-0,552	0,098	Belanja modal	0,671**)	0,034
0,503	0,138	Belanja subsidi	0,000	1
-0,794	0,006	Belanja hibah	0,579	0,079
-0,164	0,651	Belanja bantuan sosial	0,598*)	0,068
-0,564	0,090	Belanja lain-lain	0,323	0,362
-0,915**)	0,000	Transfer ke daerah	0,878**)	0,001
-0,842**)	0,002	Total belanja pemerintah pusat	0,976**)	0,000

Sumber: Hasil olah data

Dari hasil pengujian koefisien Spearman Rank di atas dapat dilihat bahwa belanja pemerintah berhubungan positif dengan ketimpangan yang dihitung dengan Indeks Williamson yang menyertakan DKI Jakarta dalam penghitungan. Hubungan yang signifikan terjadi pada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, transfer ke daerah dan nilai total belanja pemerintah pusat. Makin bertambah belanja pemerintah tersebut makin meningkat pula ketimpangan/indeks Williamson. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Song (2013) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan daerah di China pada tahun 1978-2007. Ketimpangan pendapatan antar provinsi di China disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang bias pada suatu wilayah. Hal ini menyebabkan distribusi belanja pemerintah yang tidak merata antar provinsi sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan antar provinsi di China (Zhang dan Zou, 2012). Samanta dan Cerf (2009) juga menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah yang didistribusikan dengan baik dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Dalam hal Indonesia, pengeluaran pemerintah masih berpusat di wilayah Jawa seperti tercantum dalam Nota Keuangan APBN 2019 bahwa belanja negara yang dilaksanakan melalui belanja K/L dan TKDD berdasarkan kewilayahan, proporsinya secara spasial yang paling besar berada pada wilayah Jawa, diikuti wilayah Sumatera, wilayah Sulawesi, wilayah Maluku dan Papua, wilayah Kalimantan, dan wilayah Bali-Nusa Tenggara. Porsi belanja negara tersebut sebagian besar berada di wilayah Jawa dan Sumatera, dimana kedua wilayah tersebut memang memiliki jumlah penduduk besar dan menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan, dan pariwisata.

Gambar 6. Belanja Negara Menurut Wilayah, 2019



Sumber: Kementerian Keuangan, 2020

Sementara itu, jika indeks Williamson dihitung tanpa DKI Jakarta, maka hubungan belanja negara dengan ketimpangan justru negatif, artinya makin tinggi jumlah belanja negara maka ketimpangan antar wilayah menurun. Belanja pemerintah yang berkorelasi signifikan dengan indeks Williamson yang dihitung tanpa *outlier*, DKI Jakarta, di antaranya belanja pegawai, belanja barang, transfer ke daerah, dan total belanja pemerintah pusat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (*p value*) di atas 0,05 seperti yang tampak

di Tabel 5, sisi kiri. Hasil ini konsisten dengan Ostergaard (2013) yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di negara-negara Sub Sahara. Menurut Claus, dkk. (2014), jika belanja pemerintah dilihat per sektor, maka belanja publik di bidang kesehatan dan pendidikan dapat menurunkan ketimpangan pendapatan di negara-negara Asia. Lebih lanjut Park dan Shin (2015) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Ospina (2010) menunjukkan bahwa belanja publik di bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Doerrenberg dan Peichl (2014) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pengelompokan menggunakan tipologi Klassen diketahui bahwa masih banyak provinsi yang masuk ke dalam kuadran 2 dimana pertumbuhannya tinggi namun PDRB per kapitanya di bawah rata-rata (19 provinsi). Hal ini pun didukung dengan penghitungan indeks Williamson antar provinsi dimana penghitungan indeks Williamson tiap provinsi untuk mengukur ketimpangan wilayah dalam provinsi di tahun 2010 dan 2018 menunjukkan bahwa masih banyak provinsi yang memiliki tingkat ketimpangan tinggi (indeks Williamson di atas 0,5). Dari hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa indeks tersebut mengalami penurunan di 18 provinsi, sedangkan 15 provinsi lainnya mengalami peningkatan indeks Williamson (Tabel 3). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun pemerintah daerah telah membuahkan hasil meskipun masih perlu upaya pemerataan lagi agar nilai indeks Williamson turun secara signifikan. Hal ini dikarenakan secara nasional, indeks Williamson berada di kisaran 0,70-0,76 yang mendekati angka 1, artinya Indonesia mengalami ketimpangan wilayah yang tinggi.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerataan dilakukan dengan pengalokasian pengeluaran pemerintah hingga ke level desa di seluruh wilayah Indonesia. Hasil pengujian korelasi antara indeks Williamson dan belanja pemerintah menunjukkan bahwa belanja pemerintah berhubungan positif dengan ketimpangan. Hubungan yang signifikan terjadi pada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, transfer ke daerah dan nilai total belanja pemerintah pusat. Makin bertambah belanja pemerintah tersebut makin meningkat pula ketimpangan/indeks Williamson. Hal ini mengingat belanja negara masih terpusat di wilayah Jawa sehubungan dengan banyaknya jumlah penduduk di pulau ini dan banyaknya pusat kegiatan usaha di dalamnya.

5.2. Saran

Melihat masih adanya ketimpangan di wilayah Indonesia, maka perlu diupayakan agar pembangunan lebih merata yang menjangkau seluruh wilayah

Indonesia terutama secara kualitatif sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Langkah pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah desa serta dialokasikannya Dana Desa sejak 2015 merupakan langkah yang bagus namun masih diperlukan pengawasan agar infrastruktur yang dibangun dan penggunaan alokasi anggaran memberikan pembangunan yang memiliki *multiplier effect* tinggi dan inklusif ke semua lapisan masyarakat.

Untuk kedepannya, penelitian ini perlu dilakukan lagi dengan menguji pengaruh belanja pemerintah baik menurut fungsi maupun jenisnya. Selain itu, perlu dilakukan pengujian dengan periode uji yang lebih panjang agar dampak belanja pemerintah dapat lebih terlihat. Pengambilan sampel menurut daerah atau wilayah baik itu menurut pulau, provinsi, ataupun kabupaten/kota juga diperlukan untuk menguji lebih dalam dampak belanja pemerintah terhadap ketimpangan.

Daftar Pustaka

- Acconcia, A., and Del Monte, A. 1999. Regional Development and Public Spending: The Case of Italy. June 1999. Working paper
- Bappenas, 2012. Analisis Kesenjangan Antar Wilayah 2012.
- Bappenas. 2017. Prakarsa Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pengurangan Kesenjangan Wilayah Dan Pembangunan Daerah. ISBN: 978-602-61004-1-2
- BPS. 2020. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019. Berita Resmi Statistik No. 17/02/Th. XXIV, 5 Februari 2020, Jakarta
- Calderon, Cesar and Serven, Luis. 2004, The Effect of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution, Central Bank of Chile, Working paper No.270, September 2004. pp. 1 – 47.
- Claus, I., Martinez-Vazquez, J., and Vulovic, V. 2014, Inequality in Asia and The Pacific: Trend, Driver and Policy Implication, New York, Edited by Ravi Kanbur, Chang Young Rhee and Juzhong Zuang, Routledge and Asian Development Bank.
- Doerrenberg, Philipp and Peich, Andreas. 2014, The Impact of Redistributive Policies on Inequality in OECD Countries, Center for European Economic Research, Discussion Paper, No. 14-012.
- Kementerian Keuangan. 2020. Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2020.
- Kutscherauer, Alois, et al. 2010. Regional Disparities: Disparities in country regional development - concept, theory, identification and assessment. Technical University of Ostrava. Working paper
- Martines-Vazquez, Jorge., Moreno-Dodson, Blanca and Vulovic, V. 2012, The Impact of Tax and Expenditure Policies on Income Distribution: Evidence

from a Large Panel of Countries, International Center for Public Policy, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Working Paper 12-25, April 2012, pp. 1-45.

- Mukaramah H., Jalil, Ahmad Z. A., and Bakar, Nor'Aznin A. 2011, Household Income Distribution Impact of Public Expenditure by Component in Malaysia, *International Review of Business Research Paper*, Vol. 7, No. 4, pp. 140-165.
- Nangarumba, Muara. 2015. Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014. *JESP*-Vol. 7, No. 2 November 2015. ISSN 2086-1575
- OECD. 2002. *Geographic Concentration and Territorial Disparity in OECD Countries*. Paris: OECD Publications Service.
- OECD. 2003. *Geographic Concentration and Territorial Disparity in OECD Countries*. Paris: OECD Publications Service.
- Ospina, Monica. 2010, *The Effect of Social Spending on Income Inequality: An Analysis of Latin American Countries*, *Economia y Finanzas*, Universidad, EAFIT, No. 10-03.
- Ostergaard, S. F. 2013, *Determinant of Income Inequality: A Sub-Saharan Perspective*, Thesis, School of Business and Social Sciences, Aarhus University.
- Park, Donghyun and Shin, Kwanho. 2015, *Economic Growth, Financial Development and Income Inequality*, ADB. Economic Working Paper Series, No. 441.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran, Lampiran III
- Rayhchaudhuri, Ajitava. 2010. *Trade, Infrastructure and Income Inequality in Selected Asian Countries: An Empirical Analysis*. Asia-Pacific Research and Training Network on Trade Working Paper Series, No. 82.
- Republika. 2019. *Belanja Pemerintah Belum Optimal Dorong Pertumbuhan Ekonomi*, artikel tayang 12 Agustus 2019. Diakses dari republika.co.id
- Samanta, S. K. and Cerf, J. G. 2009, *Income Distribution and Effectiveness of Fiscal Policy: Evidence from Transitional Economics*, *Journal of Economics and Business*, Vol. XII, No. I, pp. 29-45.
- Sjafrizal. 2008, *Teori Ekonomi Regional dan Aplikasi*, Padang, Sumatera Barat: Baduouse Media, pp 104 -111.

- Sjafrizal. 2014. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Sjafrizal. 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Prisma, Tahun XXVI, No. 34, LP3ES.
- Song, Yang. 2013, *Rising Chinese Regional Income Inequality: The Role of Fiscal Decentralization*, *China Economic Review*, pp. 1-16.
- WEF. 2018. *The Inclusive Development Index 2018 Summary and Data Highlights*.
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2018.pdf
- Zang, Qinghua and Zou, Heng-fu. 2012, *Regional Inequality in Contemporary China*, *Annual of Economics and Finance*, Vol. 13, No. 1, pp. 113-137.